



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. WAHYUDI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 670823

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 901.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/45 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.371 m2/2.371 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 101.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 38.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.343.685**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 964.343.685**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 964.343.685

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **UMAR KHAYYAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **670810**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **747.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m<sup>2</sup>/113 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m<sup>2</sup>/156 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **11.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **5.444.916**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. **763.944.916**

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **763.944.916**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BERTHOLOMEUS GEORGE DA SILVA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670824

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m<sup>2</sup>/81 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m<sup>2</sup>/7 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 106.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.256.849

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.026.256.849

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.026.256.849

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ABDUL ALLAM AMRULLAH
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 661767

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 16.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2L2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA B5D02K2M2 MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.545.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 601.545.000

**III. HUTANG** Rp. 201.150.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 400.395.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

<b>BIDANG</b>	: EKSEKUTIF		
<b>LEMBAGA</b>	: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		
<b>UNIT KERJA</b>	: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR		
<b>I. DATA PRIBADI</b>			
1. Nama	: MUHAMMAD HAZAIRIN		
2. Jabatan	: ANGGOTA		
3. NHK	: 670819		
<b>II. DATA HARTA</b>			
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>		Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>		Rp.	21.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 21.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>		Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>		Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>		Rp.	52.362.136
<b>F. HARTA LAINNYA</b>		Rp.	----
<b>Sub Total</b>		Rp.	73.362.136
<b>III. HUTANG</b>		Rp.	80.376.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>		Rp.	-7.013.864

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.